

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hasil analisis data yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Upah Minimum (X_1), secara Parsial berpengaruh Positif dan signifikan sebesar 0.3907 terhadap Kemiskinan (Y) di Kota Kupang. Variabel Pengangguran (X_2), secara parsial berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0.9402 terhadap variabel Kemiskinan (Y) di Kota Kupang dan Variabel Pendidikan (X_3) secara parsial berpengaruh Positif dan signifikan sebesar 0.0748. terhadap Kemiskinan (Y) di Kota Kupang.
2. Upah Minimum (X_1), Pengangguran (X_2) dan Pendidikan (X_3) berpengaruh secara simultan sebesar 0.3907 terhadap Kemiskinan (Y) di Kota Kupang.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian, Maka diberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah, terus memperhatikan Kemiskinan yang ada di Kota Kupang. Dimana pemerintah daerah Kota Kupang salah satunya membuka lapangan pekerjaan sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Dengan mengurangnya tingkat pengangguran maka tingkat Kemiskinan akan semakin menurun.
2. Memberantas Kemiskinan adalah salah satu pencapaian yang baik yang harus dilakukan Pemerintah Kota Kupang maka dari itu peningkatan taraf pendidikan harus menjadi fokus utama dalam Pembangunan Ekonomi masyarakat.

3. Dengan Tingkat Kemiskinan yang rendah, Pemerintah diharapkan dapat menemukan solusi baru dalam memberantas kemiskinan yang terjadi Di Kota Kupang dengan menemukan Lapangan Pekerjaan baru agar angkatan kerja di Kota Kupang bisa terserap dengan baik.
4. Peneliti berharap, untuk peneliti selanjutnya harus mampu memberikan dan mengembangkan penelitian dan pengembangan variabel-variabel bebas seperti Upah Minimum, Pengangguran dan Pendidikan terhadap Kemiskinan di Kota Kupang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Hakim. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azhara, Sofhia. 2010. Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sragen Sebelum dan Sesudah One Stop Service Tahun 2000-2005. Surakarta: Skripsi Kearsipan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret.
- Aulia, Nely 2014. *Hubungan Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012*. Semarang : Skripsi Kearsipan Universitas Negeri Semarang.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mulatsih, Endang Sri. 2014. *Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Sebelum dan Sesudah Pemekaran*. Sumatera Selatan: Jurnal Ekonomi Kearsipan STIE Drama Pratama.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah.
- Raharjo, Budi. 2017. *Menkeu Kritisi Ketergantungan Pemda pada Transfer Dana ke Daerah*. (online)
https://www.republika.co.id/amp_version/p0jn8y415) diakses 17 April 2018
- Timor Express. 2017. *PAD NTT Tembus 1 Triliun*. (online)

(<https://timorexpress.fajar.co.id/2017/10/24/pad-ntt-tembus-rp-1-triliun-2/>)
diakses 17 April 2018

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.

Zuraya, Nidia. 2018. *Menkeu Tunda Transfer DAU 192 Pemda*. (online)
(<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/03/12/p5hbxn383-menkeu-tunda-transfer-dau-192-pemda>)